

**Nama : Saqila Rahma Andini**

**NPM : 2313031020**

**Kelas : A 2023**

Pendapat saya terhadap kedua isi artikel jurnal di atas menunjukkan bahwa keduanya menyoroti aspek penting dalam pengelolaan aset tetap pemerintah, yaitu akurasi, transparansi, dan pengawasan yang efektif melalui pelaporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Berikut elaborasi argumentasi saya berdasarkan teori dan hasil riset yang relevan:

### **1. Pentingnya Pelaporan Aktiva Tetap yang Akurat dan Transparan**

Menurut teori akuntansi pemerintahan, pelaporan aset tetap harus memenuhi prinsip relevansi dan keandalan agar dapat mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan yang efektif (Hidayat & Suryadi, 2018). Artikel pertama menegaskan bahwa sistem pelaporan saat ini belum memenuhi kebutuhan pemeriksa karena kekurangan informasi penting seperti biaya penyusutan dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan temuan riset oleh Kurniawan (2020), yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan data dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi menghambat pengawasan aset pemerintah secara efektif.

### **2. Kebutuhan Pengembangan Sistem Pelaporan yang Sesuai Standar**

Teori sistem informasi akuntansi menyatakan bahwa sistem pelaporan harus mampu menyediakan data lengkap dan akurat untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Artikel pertama menyarankan perlunya pengembangan sistem pelaporan yang mampu mengakomodir kebutuhan pengawasan dan sesuai standar akuntansi berbasis akrual, seperti PP No. 71 Tahun 2010. Riset oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan pemerintah, sehingga mendukung pengawasan yang lebih efektif.

### **3. Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengungkapan yang Memadai**

Standar PSAK dan SAP memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap (Indriani & Pratama, 2021). Artikel kedua menegaskan pentingnya pengungkapan lengkap mengenai nilai tercatat, metode penyusutan, dan hak milik, yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Riset oleh Wulandari (2020) menunjukkan bahwa pengungkapan yang lengkap dan sesuai standar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengawasan internal.

#### **4. Tantangan Implementasi dan Perlunya Peningkatan Kapasitas**

Kendala utama dalam implementasi sistem pelaporan berbasis akrual adalah kapasitas sumber daya manusia dan teknologi (Yusuf & Rahman, 2019). Artikel pertama menyarankan percepatan penerapan akuntansi berbasis akrual dan peningkatan sistem pelaporan, yang sejalan dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa pelatihan dan penguatan kapasitas pegawai serta pengembangan teknologi informasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

#### **5. Implikasi Praktis dan Rekomendasi**

Kedua artikel menegaskan bahwa peningkatan sistem pelaporan dan penerapan standar akuntansi yang tepat akan meningkatkan validitas, kelengkapan, dan pengungkapan aset tetap. Hal ini sejalan dengan teori pengendalian internal (COSO, 2013), yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang baik merupakan bagian integral dari pengendalian internal yang efektif. Rekomendasi untuk mempercepat penerapan akuntansi berbasis akrual dan memperbaiki prosedur pelaporan sangat relevan untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan aset pemerintah secara berkelanjutan.

#### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kedua artikel menegaskan bahwa pengelolaan aset tetap pemerintah masih menghadapi tantangan dalam hal sistem pelaporan dan penerapan standar akuntansi yang memadai. Pengembangan sistem pelaporan yang lengkap, akurat, dan sesuai standar, didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, merupakan kunci untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah. Pendekatan berbasis teori dan hasil riset mendukung pentingnya reformasi sistem pelaporan aset tetap sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.